

No. Reg Release 015/RLS/IV/2023**Menaikan Tarif Transjakarta Bukan Usulan Tepat Bagi Permasalahan Transportasi di Jakarta**

Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia menyalahkan usulan Dewan Transportasi Jakarta (DTKJ) kepada Pejabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta yang akan menaikkan tarif Transjakarta sebesar Rp 5.000,- dengan alasan sejak tahun 2007 tidak ada kenaikan tarif. Kenaikan yang diusulkan DTKJ sangat mencederai rasa keadilan pengguna transportasi Jakarta yang selama ini belum terlayani dengan baik. Kalau dipahami secara seksama banyak persoalan yang mendasar yakni persoalan transportasi Jakarta belum terselesaikan dengan baik, sebaliknya justru yang diterima kemacetan semakin bertambah parah.

Usulan DTKJ seharusnya memahami kondisi masyarakat yang menghadapi pengeluaran untuk menghadapi hari raya idul fitri, kebutuhan anak untuk masuk sekolah, dan kenaikan harga bahan pokok semakin melambung tinggi. DTKJ harusnya memahami bahwa tarif Rp 3.500,- bukan hanya semata-mata dari konsumen akan tetapi juga adanya subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang selama ini tidak dibuka ke publik besaran subsidi yang diberikan ke pengguna.

Jadi sudah sewajarnya kalau pengguna transportasi publik mendapatkan subsidi, bukan malah DTKJ mendorong kenaikan tarif sehingga akan menambah beban pada pengguna transportasi. FAKTA Indonesia menyalahkan keputusan DTKJ karena tidak melakukan survei mandiri justru mengandalkan survei melalui akun Instagram @dishubdkijakarta. Seharusnya DTKJ mampu melakukan survei mandiri sehingga idependesinya dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mendorong kenaikan tarif ada 2 hal yang harus diperhatikan. Pertama Dinas Perhubungan (Dishub) mendapat dukungan publik melalui suara DTKJ dengan hasil survei yang dilakukan untuk mendapat dukungan masyarakat sebagai legitimasi menaikkan tarif. Kedua mengharapkan dukungan DPRD DKI Jakarta apabila tidak akan bisa menaikkan tarif dari pengguna transportasi akan bisa mendapatkan kenaikan subsidi dari APBD DKI Jakarta. Dua hal tersebut yang harus diwaspadai publik agar dapat melihat jernih bahwa kenaikan tarif bukan solusi utama dalam membenahi carut marut transportasi di Jakarta justru akan membebani warga pengguna transportasi publik kemungkinan besar pengguna akan beralih ke kendaraan bermotor.

Dengan hal tersebut di atas FAKTA Indonesia mendukung PJ Gubernur DKI Jakarta untuk mengaji kembali wacana menaikkan tarif dan DPRD DKI Jakarta harus mempertimbangkan kembali subsidi yang selama ini digunakan untuk pengguna sudah tepat atau ada hal yang salah dalam penerapannya dan perlu dibuka ke publik besaran subsidi sehingga masyarakat mampu mengontrol anggaran yang bersumber dari DPRD DKI Jakarta.

Jakarta, 12 April 2023
Ary Subagyo Wibowo, S.H.
Sekretariat Jenderal FAKTA Indonesia
CP: 0812-9444-996